

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

TAHUN ANGGARAN 2023

bkkbn
Berencana itu keren



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 38 Tlp. (0265) 776670

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Akhir tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan keuangan Akhir Tahun ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Perundangan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, telah menyusun Laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan dilampiri oleh Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja.

Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 per 31 Desember 2023 diketahui bahwa realisasi anggaran Akhir Tahun 2023 sebesar Rp.25.738.707.998,00 atau 93,08% dari total pagu anggaran sebesar Rp.27.652.613.361,00 sehingga terdapat Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.913.905.363,00.

Selanjutnya Neraca Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023. Neraca Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah sebesar Rp.9.766.115.377,55. Nilai Aset sebesar Rp. 9.766.115.377,55 tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.1.473.000,00 dan Aset Tetap Rp.9.764.642.377,55. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.370.000.486,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 9.396.114.891,55 sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.9.766.115.377,55. naik sebesar 14,36% dari jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.539.474.732,72.

Laporan Operasional SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/defisit-LO yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Surplus/(defisit) Operasional SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan nilai sebesar (Rp.24.699.502.215,17)..

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.352.846.258,72 terdiri dari surplus/defisit-LO sebesar (Rp.24.699.502.215,17) ditambah dengan RK PPKD Rp.25.738.707.998,00, sehingga ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp.9.396.114.891,55. Uraian lebih lengkap dan rincian akan disajikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya Laporan keuangan Akhir Tahun ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban Keuangan serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Januari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ciamis



Dr/ DIAN BUDIYANA, M.Si

Pangkat Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19671213 199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 38 Telp (0265) 776670
CIAMIS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Akhir Tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis yang terdiri dari : (a) Neraca per 31 Desember 2023, (b) Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023; (c) LO per 31 Desember 2023, (d) LPE per 31 Desember 2023 (e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Akhir Tahun 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Akhir Tahun ini secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Ciamis, Januari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ciamis



Dr. DIAN BUDIYANA, M.Si

Pangkat Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19671213 199301 1 001

DAFTAR ISI

NO		HAL
1.	Kata Pengantar	i-ii
2.	Pernyataan Tanggung Jawab	iii
3.	Daftar Isi	iv-v
4.	Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 :	
	- Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023	vi
	- Neraca Komparatif Per 31 Desember 2023	vii
	- LO Per 31 Desember 2023	viii
	- LPE Per 31 Desember 2023	ix
	- Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023	1 – 52
5.	Lampiran – Lampiran	
	5.1. Laporan Kinerja	
	5.2. Laporan Realisasi Anggaran	
	- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional per 31 Desember 2023)	
	5.3. Lampiran - lampiran	
	5.3.1 Kas	
	a. Berita Acara Penutupan Kas.	
	b. Register Penutupan Kas.	
	c. R/C.	
	d. Rekon Bank.	
	5.3.2 Persediaan	
	a. Berita Acara Perhitungan Barang Persediaan.	
	b. Daftar Persediaan.	

5.3.3 Aset Tetap

- a. Berita Acara Aset
- b. Rekapitulasi Mutasi Aset
- c. Rekapitulasi Buku Inventaris.
- d. KIB.A,B,C D E dan F
- e. Rekapitulasi Penyusutan

5.4. Lampiran Lainnya

- a. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023.
- b. Register SPP/SPM/SP2D 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- c. SK Usulan Penghapusan Aset Tetap.
- d. Rekapitulasi Utang Jasa Kantor.
- e. Register Kontrapos.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2023 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2023 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun ini adalah :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah:

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang .. menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- q. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15B Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

- r. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis;
- s. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- t. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 900 1.3/Kpts.4-Huk/TAHUN 2023 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- u. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 900.1.3/Kpts.52-Huk/2023 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023; tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah

Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2. Pos - Pos Neraca
- 3.3. Pos - Pos Laporan Operasional
- 3.4. Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab V Penutup



BAB II

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.2 Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut melalui kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas. Adapun uraian kinerja program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis yang terdiri dari Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disajikan dalam laporan keuangan ini sudah sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Arah kebijakan dan Strategi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis difokuskan untuk :

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB
3. Peningkatkan pelayanan KB dengan dengan penggunaan MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesetaraan ber KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, efektif dan efisien (REE).

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.
5. Advokasi Program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan pergerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesetaraan ber KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber KB.
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.
9. Penguatan bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/ kajian kependudukan, keluarga Berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan program KKBPK.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	HASIL
	BELANJA LANGSUNG	27.652.613.361	25.738.707.998	93,07	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.949.052.311	7.090.554.576,00	97,75	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.200.000	19.400.000	80,16	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	200.000	200.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	24.000.000	19.200.000	80,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.200.000	24.200.000,00	100,00	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	200.000	200.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	

3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.400.000	-		
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	200.000	-		
	Belanja jasa tenaga administrasi	19.200.000	-		
4.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	19.400.000	-		
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	200.000	-		
	Belanja jasa tenaga administrasi	19.200.000	-		
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.700.000	26.700.000	100,00	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	7.500.000	7.500.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	19.200.000	19.200.000	100,00	
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.712.646.511	5.344.152.577	93,54	
	Belanja gaji pokok PNS	2.365.588.063	2.360.507.000	99,78	
	Belanja gaji pokok PPPK	23.850.000	11.866.000	0,00	
	Belanja tunjangan keluarga PNS	238.842.363	238.750.828	99,97	
	Belanja tunjangan keluarga PPPK	3.339.092	1.127.270	33,75	
	Belanja tunjangan jabatan PNS	307.291.600	303.740.000	98,84	
	Belanja tunjangan fungsional PPPK	3.618.000	2.144.000	15,82	
	Belanja tunjangan fungsional umum PNS	13.552.425	13.485.000	99,50	
	Belanja tunjangan beras PNS	115.578.578	115.202.640	99,67	
	Belanja tunjangan beras PPPK	2.329.027	796.620	34,20	
	Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS	8.177.719	7.934.299	9,70	
	Belanja pembulatan gaji PNS	26.126	26.059	99,74	
	Belanja pembulatan gaji PPPK	5.025	265	5,27	

	Belanja iuran jaminan kesehatan PNS	182.099.254	168.492.703	92,52	
	Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK	1.359.492	605.490	0,00	
	Belanja iuran jaminan kecelakaan PNS	4.931.883	4.844.794	98,23	
	Belanja iuran jaminan kecelakaan PPPK	57.245	28.480	49,75	
	Belanja iuran jaminan kematian PNS	14.795.694	14.534.417	98,23	
	Belanja iuran jaminan kematian PPPK	71.556	85.436	119,39	
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	578.207.720	491.912.000	85,07	
	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS	74.406.180	63.364.000	85,15	
	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	1.774.518.809	1.544.615.276	87,04	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.200.000	15.200.000	100,00	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	800.000	800.000	100	
	Belanja jasa tenaga administrasi	14.400.000	14.400.000	100,00	
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.900.000	15.900.000	100,00	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1.500.000	1.500.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	14.400.000	14.400.000	100,00	
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.696.000	5.696.000	100,00	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor –alat listrik	5.696.000	5.696.000	100,00	
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.060.000	19.060.000	100,00	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	18.400.000	18.400.000	100,00	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	660.000	660.000	100,00	
	Belanja modal personal computer	-			
	Belanja modal peralatan personal computer	-			

11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.000.000	24.840.000	92,23	
	Belanja makan dan minuman rapat	26.950.000	20.790.000	77,14	
	Belanja makan dan minuman jamuan tamu	4.050.000	4.050.000	100,00	
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.918.500	11.837.000	54,00	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	21.918.500	11.837.000	54,00	
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	126.480.000	125.040.000	100,00	
	Belanja langganan jurnal/surat kabar /majalah	126.480.000	125.040.000	98,86	
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.780.000	38.802.000	92,87	
	Belanja perjalanan dinas biasa	25.480.000	22.504.000	88,32	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	16.300.000	16.298.000	100	
15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.205.000	16.735.000	91,92	
	Belanja bahan isi tabung	2.870.000	2.620.000	91,28	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	300.000	300.000	100	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	15.035.000	13.815.000	91,88	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.761.000	42.541.652	66,72	
	Belanja jasa pemasangan instalasi telp,air,dan listrik	10.500.000	10.500.000	100	
	Belanja tagihan telephone	1.260.000	836.568	66,40	
	Belanja tagihan air	2.501.000	1.838.600	73,51	
	Belanja tagihan listrik	49.500.000	29.366.484	59,32	
17.	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	364.500.000	363.300.000	99,58	
	Belanja jasa tenaga administrasi	288.000.000	286.800.000	19,12	
	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	1.500.000	1.500.000	100	

	Belanja jasa tenaga kebersihan	75.000.000	75.000.000	100	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.425.300	205.195.350	83,60	
	Belanja bahan bahan bakar dan pelumas	46.000.000	32.828.000	71,36	
	Belanja pembayaran pajak bea,dan perizinan	34.000.000	33.238.250	97,76	
	belanja pemeliharaan alat angkutan-darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan	165.425.300	139.129.100	84,10	
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.700.000	8.600.000	73,50	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga –alat kantor –alat kantor lainnya	11.700.000	8.600.000	73,50	
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.880.000	16.830.000	11,86	
	Belanja jasa koonsultasi perencanaan arsirektur jasa arsirektur lainnya	24.000.000	-	-	
	Belanja jasa konsultasi pengawasan arsirektur	21.000.000	-	-	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga –alat kantor – alat kantor lainnya	4.880.000	1.830.000	37,5	
	Belanja pemeliharaan bangunan gedung –bangunan gedung kantor	92.000.000	15.000.000	15,30	
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.483.350.000	201.971.500,00	13,61	
21.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	36.250.000	36.250.000	100	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor	15.000.000	15.000.000	100	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	575.000	575.000	100,00	
	Belanja makan dan minuman rapat	3.675.000	3.675.000	100,00	
	Honorarium narasumber,atau pembahas moderator,pembawa acara,dan panitia	1.500.000	1.500.000	100,00	
	Belanja jsa tenaga admiustrasi	13.500.000	13.500.000	100,00	
	Belanja jasa penyelenggara acara	-			

	Belanja sewa bangunagedung tempat pertemuan	-			
	Belanja sosialisasi	-			
	Belanja perjalanan dinas biasa	-			
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	2.000.000	2.000.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	-			
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	-			
22.	Sosialisasi peningkatan perempuan di bidang politik ,hukum,sosial dan ekonomi	357.500.000	356.200.000	99,63	
	Belanja makanan dan minuman rapat	227.500.000	226.200.000	99,42	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	130.000.000	130.000.000	100,00	
23.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	339.600.000	339.600.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor – bahan kantor	62.700.000	62.700.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak	9.803.000	9.803.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor –benda pos	800.000	800.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	79.100.000	79.100.000	100,00	
	Belanja makan dan minuman jamuan tamu	870.000	870.000	100,00	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	59.000.000	59.000.000	100,00	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	15.600.000	15.600.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	
	Belanja sewa alat kantor lainnya	6.375.000	6.375.000	100,00	
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	2.000.000	2.000.000	100,00	

	Belanja perjalanan dinas biasa	20.920.000	2.000.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	58.432.000	58.432.000	100,00	
24.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	303.814.600	60,76	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor – bahan kantor	53.250.000	18.750.000	35,21	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	21.035.000	13.111.100	62,32	
	Belanja makanan dan minuman rapat	254.625.000	170.117.500	66,81	
	Belanja makan dan minuman jamuan tamu	9.170.000	5.410.000	58,99	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	45.500.000	32.000.000	70,32	
	Belanja sewa gedung tempat pertemuan	19.750.000	15.500.000	78,48	
	Belanja sewa hotel	15.000.000	-		
	Belanja perjalanan dinas biasa	46.160.000	15.256.000	33,05	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	15.280.000	13.420.000	87,82	
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	20.250.000	20.250.000	100,00	
25.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	147.994.500	59,19	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor – bahan kantor	73.250.000	38.250.000	52,21	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	4.190.000	3.482.000	83,10	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor –alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	18.000.000	-		
	Belanja makanan dan minuman rapat	45.675.000	33.862.500	74,13	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	13.500.000	12.000.000	88,89	

	Belanja jasa tenaga administrasi	3.200.000	-		
	Belanja sewa alat kantor lainnya	7.125.000	-		
	Belanja sewa gedung tempat pertemuan	4.750.000	4.500.000	94,73	
	Belanja perjalanan dinas biasa	7.120.000	7.120.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	67.940.000	48.780.000	71,79	
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	5.250.000	-		
111	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	446.013.100	423.813.100	95,02	
26.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	7.213.100	5.013.100	69,50	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor	3.560.000	3.500.500	98,32	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak	1.312.500	1.312.500	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	-			
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	-			
	Belanja jasa tenaga administrasi	200.000	200.000	100,00	
	Belanja sewa gedung tempat pertemuan	-	-		
	Belanja perjalanan dinas biasa	2.140.000	-		
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	-			
	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	-			
27.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	438.800.000	418.800.000	95,442	
	Belanja suku cadang suku cadang alat kedokteran	2.875.000	2.875.000	100,00	

	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/tulis tulis kantor	68.250.000	68.250.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak	19.135.000	19.135.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	68.250.000	68.250.000	100,00	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	17.000.000	17.000.000	100,00	
	Honorarium pemberi keterangan ahli,saksi ahli,dan beracara	6.000.000	6.000.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga kesehatan	38.400.000	38.400.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga ahli	48.000.000	28.000.000	100,00	
	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	12.500.000	12.500.000	100,00	
	Belanja sewa bangunan gedung kantor	120.000.000	120.000.000	100,00	
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	5.000.000	5.000.000	100,00	
	Belanja sosialisasi	12.000.000	12.000.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas biasa	12.550.000	12.550.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	92.840.000	92.840.000	100,00	
1V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	332.262.000	274992.000	98,67	
28.	Advokasi kebijakan dan pedampingan pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah ,non pemerintah ,media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	247.600.000	247.600.000	97,83	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –alat tulis kantor	21.600.000	21.600.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –alat tulis cetak	56.208.000	56.208.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000	21.000.000	100,00	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	8.000.000	8.000.000	100,00	

	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	15.800.000	15.800.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	14.250.000	14.250.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga ahli	2.000.000	2.000.000	100,00	
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	9.000.000	9.000.000	100,00	
	Belanja sosialisasi	2.000.000	2.000.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas biasa	9.296.000	9.296.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	29.462.000	29.462.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	59.184.000	59.184.000	100,00	
29.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.662.000	26.492.000	31,30	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –alat tulis kantor	31.800.000	7.800.000	24,52	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –alat tulis cetak	4.522.000	4.522.000	100	
	Belanja makanan dan minuman rapat	11.550.000	3.150.000	27,27	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	5.000.000	2.000.000	40,0	
	Belanja jasa tenaga administrasi	-	-		
	Belanja jasa tenaga penyelenggara acara	-	-		
	Belanja sewa alat kantor lainnya	-	-		
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	5.000.000	2.000.000	40,0	
	Belanja perjalanan dinas biasa	9.286.000	1.820.000	19,60	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	17.504.000	5.200.000	29,70	
	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	-	-		
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	-	-		

V	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	671.232.900	671.121.100	100,00	
30.	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kab/kota	189.429.000	189.429.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kator-alat tulis kantor	4.500.000	4.500.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –alat tulis cetak	4.385.000	4.385.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –benda pos	200.000	200.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000	12.600.000	100,00	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	36.000.000	36.000.000	100,00	
	Belanja jasa administrasi	6.000.000	6.000.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga ahli	90.000.000	90.000.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	-	-		
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	12.000.000	12.000.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas	23.744.000	23.744.000	100,00	
31.	Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	75.058.000	74.946.200	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kator-alat tulis kantor	12.000.000	12.000.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –alat tulis cetak	2.590.000	2.590.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –benda pos	200.000	200.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	13.020.000	13.020.000	100,00	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	15.000.000	15.000.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	3.000.000	3.000.000	100,00	

	Belanja sewa bangunan gedung untuk pertemuan	6.000.000	6.000.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas biasa	14.544.000	14.544.000	100,00	
	Belanja perjalana dinas dalam kota	8.704.000	8.592.200	98,71	
32.	Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	26.895.000	26.895.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –alat tulis cetak	645.000	645.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –benda pos	100.000	100.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	4.305.000	4.305.000	100,00	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	2.000.000	2.000.000	100,00	
	Belanja sewa bangunan gedung untuk tempat pertemuan	2.000.000	2.000.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas biasa	1.894.000	1.894.000	100,00	
	Belanja perjalana dinas dalam kota	15.951.000	15.951.000	100,00	
33.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggraan sistem informasi keluarga	25.431.000	25.431.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kator-alat tulis kantor	8.700.000	8.700.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –alat tulis cetak	595.000	595.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan utuk kegiatan kantor –benda pos	200.000	200.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.045.000	3.045.000	100,00	
	Belanja sewa bangunan gedung untuk tempat pertemuan	2.000.000	2.000.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas biasa	2.424.000	2.424.000	100,00	
	Belanja perjalana dinas dalam kota	8.467.000	8.467.000	100,00	
34.	Penyediaan informasi data dan informasi keluarga	128.219.900	128.219.900	100,00	

	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor –alat tulis cetak	4.016.500	4.016.500	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor –benda pos	200.000	200.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	13.545.000	13.545.000	100,00	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	-	-	-	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	31.200.000	31.200.000	100,00	
	Belanja jasa administrasi	9.000.000	9.000.000	100,00	
	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	60.000.000	60.000.000	100,00	
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	-	-		
	Belanja perjalanan dinas bviaya	3.678.000	3.678.000	100,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	6.580.400	6.580.400	100,00	
35.	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	226.200.000	226.200.000	100,00	
	Belanja minuman rapat	12.600.000	12.600.000	100,00	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	15.600.000	15.600.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	36.000.000	36.000.000	100,00	
	Belanja kawat /faksinil/internet/TV/berlangganan	162.000.000	162.000.000	100,00	
VI	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	11.144.128.150	10.425.458.119	97,07	
36.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	502.462.900	476.696.700	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	6.000.000	6.000.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	5.311.700	5.311.700	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-perabotan kantor	21.343.700	-		

	Belanja makanan dan minuman rapat	242.812.500	242.750.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	70.600.000	70.600.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga kesenian da kebudayaan	7.500.000	7.500.000	100	
	Belanja jasa tenaga administrasi	10.000.000	10.000.000	100,00	
	Belanja jasa penyelenggaraan acara	12.050.000	10.800.000		
	Belanja langganan junal/surat kbar/majalah	27.500.000	24.400.000	100,00	
	Belanja sewa alat kantor lainnya	32.289.800	32.289.800	100,00	
	Belanja perjalanan dinas	2.444.000	2.424.000	99,18	
	Belanja perjalanan dinas dalam klota	19.011.200	19.011.200	100,00	
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	45.600.000	45.600.000	100,00	
37.	Promosi dan KIE program KKBPk melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan	150.000.000	149.992.500	97,66	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	122.347.500	122.340.000	99,99	
	Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	7.500.000	7.500.000	100,00	
	Belanja jasa iklan /reklame.film,dan pemotretan	15.000.000	15.000.000	10,00	
	Belanja perjalanan dinmas dalam kota	5.152.500	5.152.500	100,00	
38.	Pelaksanaa mekanisme operasional program KKBPk melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcem) ,rapat koordinasi desa (rekordes),dan mini lokalaya (minilok)	900.062.000	873.346.000	97,03	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	60.000.000	60.000.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	9.157.000	8.933.000	97,56	
	Belanja makanan dan minuman rapat	373.485.000	373.380.000	99,97	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	82.300.000	78.900.000	95,86	

	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	11.500.000	11.500.000	100,00	
	Belanja sewa hotel	24.940.000	24.940.000	100,	
	Belanja perjalanan dinas biasa	57.710.000	24.940.000	43,21	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	280.000.000	36.358.000	12,98	
	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	-	-		
	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	-	-		
39.	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	1.300.050.000	1.233.495.156	94,88	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	14.850.000	14.850.000	100	
	Belanja makanan dan minuman rapat	396.900.000	396.900.000	100	
	Belanja jasa tenaga administrasi	712.800.000	712.800.000	100	
	Belanja jasa tenaga listrik	81.000.000	14.445.156	17,83	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	94.500.000	94.500.000	100	
40.	Pengendalian program KKBPK	200.000.000	142.375.000	71,18	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1.923.000	508.000	26,41	
	Belanja makanan dan minuman rapat	59.955.000	36.435.000	60,77	
	Belanja jasa tenaga ahli	20.000.000	20.000.000	100	
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	12.000.000	-	-	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	85.600.000	54.910.000	64,14	
	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	20.522.000	20.522.000	100	
41.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	494.761.000-	442.530.138	8944	

	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	67.200.000	67.200.000	100	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	5.582.500	5.582.500	100	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor –benda pos	200.000	200.000	100	
	Belanja makanan dan minuman rapat	32.812.500	32.182.500	100	
	Belanja jasa tenaga administrasi	318.000.000	266.400.000	83,78	
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	6.750.000	6.750.000	100	
	Belanja perjalanan dinas biasa	13.224.000	13.224.000	100	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	50.992.000	50.991.138	99,99	
42.	Penguatan Pelaksanaan penyuluhan ,penggerakan ,pelayanan ,dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana / penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	1.019.150.000	1.018.552.175	99,94	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	67.800.000	67.800.000	100	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2.812.000	2.812.000	100	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor –benda pos	300.000	300.000	100	
	Belanja makanan dan minuman rapat	52.290.000	52.290.000	100	
	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	1.950.000	1.950.000	100	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	8.000.000	8.000.000	100	
	Belanja jasa administrasi	742.000.000	742.000.000	100	
	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	60.000.000	60.000.000	100	
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	14.000.000	14.000.000	100	
	Belanja perjalanan dinas biasa	11.000.000	10.524.500	85,68	

	Belanja jasa perjalanan dinas dalam kota	37.098.000	36.975.675	99,67	
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	21.900.000	21.900.000	100	
43.	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	689.000.000	689.000.000	100	
	Belanja jasa tenaga administrasi	689.000.000	689.000.000	100	
44.	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jaringnya	63.000.000	565.590.400,00	89,77	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	63.000.000	32.439.000	51,49	
45..	Peningkatan kesetaraan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1.395.015.000	1.394.978.000	99,99	
	Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran	85.168.000	85.168.000	100	
	Belanja makanan dan minuman rapat	12.847.000	12.810.000	99,71	
	Belanja jasa tenaga kesehatan	922.400.000	922.400.000	100	
	Belanja jasa tenaga penanganan sosial	53.400.000	53.400.000	100	
	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	321.200.000	321.200.000	100	
46.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	1.914.839.000	1.868.245.500	97,56	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	2.800.000	2.800.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2.200.000	2.200.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000	2.992.500	99,75	
	Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya	9.000.000	9.000.000	100,00	
	Belanja jasa konsultasi pengawasan arsiteksur	10.000.000	9.901.000	99,01	
	Belanja [perjalanan dinas dalam kota	3.000.000	3.000.000	100,00	
	Belanja modal kendaraan bermotor penumpang	450.000.000	430.290.000	95,62	

	Belanja modal mebel	14.000.000	13.875.000	99,10	
	Belanja modal ala pendingin	6.000.000	5.994.000	99,90	
	Belanja modal personal komputer	270.000.000	260.901.000	96,63	
	Belanja modal bangunan gedung kantor	1.144.839.000	1.127.292.000	98,46	
47.	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringan	513.222.500	279.796.500	54,51	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	131.250.000	131.250.000	100,00	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	680.000	440.000	64,70	
	Belanja makanan dan minuman rapat	53.587.500	11.287.500	21,06	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	15.600.000	15.600.000	100,00	
	Belanja jasa tenaga administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00	
	Belanja sewa gedung tempat pertemuan	14.000.000	2.000.000	14,28	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	286.105.000	107.219.000	37,48	
48.	Peningkatan kesetaraan KB Pria	228.677.500	119.422.900	52,22	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	104.550.000	60.300.000	57,67	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	360.000	240.000	66,66	
	Belanja makanan dan minuman rapat	35.437.500	20.317,600	57,33	
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	4.000.000	2.000.000	50,0	
	Belanja sewa gedung tempat pertemuan	4.000.000	2.000.000	50,0	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	80.330.000	34.565.000	43,02	
49.	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	1.773.888.250	1.794.588.550		

	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	25.500.000	25.500.000	100	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1.568.750	1.568.750	100,00	
	Belanja barang untuk di jual /di serahkan kepada masyarakat	13.250.000	13.250.000	100,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	91.845.000	59.902.500		
	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	1.500.000	1.500.000		
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	10.000.000	10.000.000		
	Belanja sewa alat kantor lainnya	6.750.000	6.750.000		
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	6.000.000	4.000.000		
	Belanja perjalanan dinas biasa	7.118.500	6.812.000		
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	1.593.656.000	1.575.620.300		
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	16.700.000	-		
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.626.574.900	6.436.335.000	63,44	
50..	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS ,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	360.000.000	357.800.000	99,91	
	Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran	325.200.000	325.200.000		
	Belanja paket/pengiriman	7.800.000	5.600.000		
51.	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	43.150.000	40.700.000,00	29,45	
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	40.000.000	-		
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	-	-		

	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000	-		
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	-	-		
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	-	-		
	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	-			
52.	Orientasi /pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	296.484.400	544.047.500		
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	47.700.000	39.600.000		
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2.429.600	2.075.200		
	Belanja barang untuk di jual /di serahkan kepada masyarakat	7.631.800	7.631.800		
	Belanja makanan dan minuman rapat	74.655.000	62.632.500		
	Honorarium narasumber atau pembahas ,moderator,pembawa acara,dan panitia	9.000.000	4.000.000		
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	15.600.000	15.600.000		
	Belanja jasa tenaga administrasi	12.000.000	12.000.000		
	Belanja jasa penyelenggara acara	2.400.000	2.400.000		
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	15.250.000	12.000.000		
	Belanja perjalanan dinas biasa	8.144.000	2.276.000		
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	74.224.000	56.382.000		
	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	-	-		
	Belanja perjalanan dinas luar kota	-	-		
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	27.450.000	27.450.000		
53.	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan	5.786.238.000	5.693.900.000		

	kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)				
	Belanja jasa tenaga administrasi	852.300.000	852.300.000		
	Belanja kawat /fakmili/internet /TV/berlangganan	2.073.736.000	1.981.400.000		
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	2.860.200.000	2.860.200.000		
54.	Promosi dan sosialisai program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	140.702.500	140.587.500		
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	30.150.000	30.150.000		
	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	-	-		
	Belanja makanan dan minuman rapat	10.552.500	10.552.500		
	Belanja jasa kesenian dan kebudayaan	-	-		
	Belanja jasa penyelenggaraan acara	80.000.000	79.885.000		
	Belanja sewa bangunan gedung tempat peertemuan	-	-		
	Belanja perjalanan dinas	20.000.000	20.000.000		
	Belanja Tidak Langsung	5.712.646.511	5.344.152.577	93,55	
	Belanja Langsung	21.939.966.850	20.394.555.421	92,96	
	Jumlah Seluruhnya	27.652.613.361	25.738.707.998	93,08	

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan

Pencapaian Kinerja telah ditetapkan di tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, Capaian Kinerja kegiatan ada yang di bawah 80% yaitu :

Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Hambatan dan kendala dari kegiatan tersebut adalah lamanya mendata No Telepon penerima manfaat (yaitu pulsa). Setelah akan di Injek/Isi pulsa banyak Nomor Telepon yang tidak aktif.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Neraca Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023. Neraca Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah sebesar Rp.9.766.115.377,55. Nilai Aset sebesar Rp. 9.766.115.377,55 tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.1.473.000,00 dan Aset Tetap Rp.9.764.642.377,55. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.370.000.486,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 9.396.114.891,55 sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.9.766.115.377,55. naik sebesar 14,36% dari jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.8.539.474.732,72.

Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sampai dengan per 31 Desember 2023 diketahui bahwa realisasi anggaran Akhir Tahun 2023 sebesar Rp.25.738.707.998,00 atau 93,08% dari total pagu anggaran sebesar Rp.27.652.613.361,00 sehingga terdapat Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.913.905.363,00.

Berdasarkan Laporan Operasional SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/defisit-LO yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Surplus/(defisit) Operasional SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan nilai sebesar (Rp.24.699.502.215,17).

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Semester pertama pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.352.846.258,72 terdiri dari surplus/defisit-LO sebesar (Rp.24.699.502.215,17) ditambah dengan RK PPKD Rp.25.738.707.998,00, sehingga ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp.9.396.114.891,55.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

3.1. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negrei Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.1.1 Belanja Operasi - LRA

Realisasi Belanja Operasi – LRA periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.23.900.355.998,00 atau mencapai 92,75% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.21.971.508.419,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	%	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA OPERASIONAL					
1	Belanja Pegawai	5.712.646.511,00	5.344.152.577,00	93,55	5.894.271.450,00	(9,33)
2	Belanja Barang dan Jasa	20.055.127.850,00	18.556.203.421,00	92,53	16.077.236.969,00	15,42
	JUMLAH	25.767.774.361,00	23.900.355.998,00	92,75	21.971.508.419,00	8,78

3.1.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.5.344.152.577,00 atau mencapai 93,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.5.712.646.511,00 atau berkurang 9,33% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.894.271.450,00. Untuk Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 tidak mencapai 100 % di karenakan ada 6 pegawai yang pensiun, dan berkurang Tunjangan Keluarga/anak yang sudah masuk batas usia 21 dan 25 tahun atau sudah lulus S1. dengan rincian sebagai berikut :

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		BELANJA PEGAWAI	5.712.646.511,00	5.344.152.577,00	368.493.934,00
1	5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.285.513.802,00	3.244.261.301,00	41.252.501,00
2	5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.427.132.709,00	2.099.891.276,00	327.241.433,00
3	5.1.1.03.	Tambahan Penghasilan Obyektif lainn	-	-	-
		JUMLAH	5.712.646.511,00	5.344.152.577,00	368.493.934,00

3.1.1.2 Belanja Barang Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.18.556.203.421,00 atau mencapai 92,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.20.055.127.850,00 atau naik 15,42 % dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.16.077.236.969,00. Untuk Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 tidak mencapai 100 % di karenakan keterkaitan dengan Revocusing anggaran kegiatan dan Penundaan jadwal kegiatan dari tingkat Propinsi Jawa Barat. Realisasi Belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut::

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.055.127.850,00	18.556.203.421,00	1.498.924.429,00
	5.1.02.01.	Belanja Barang	4.188.852.150,00	3.682.340.150,00	506.512.000,00
	5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.188.852.150,00	3.682.340.150,00	506.512.000,00
	5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.000.000,00	32.828.000,00	13.172.000,00
	5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.870.000,00	2.620.000,00	250.000,00
	5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	440.243.000,00	440.243.000,00	-
	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	952.400.000,00	766.550.000,00	185.850.000,00
	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	333.300.650,00	311.451.350,00	21.849.300,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	162.513.700,00	161.920.000,00	593.700,00
	5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.860.000,00	2.860.000,00	-
	5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-
	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-
	5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.378.700,00	13.818.000,00	22.560.700,00
	5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.696.000,00	5.696.000,00	-
	5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.000.000,00	-	18.000.000,00
	5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.881.800,00	20.881.800,00	-
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.242.082.000,00	2.001.015.000,00	241.067.000,00
	5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	88.140.000,00	84.380.000,00	3.760.000,00
	5.1.02.02.	Belanja Jasa	7.604.260.000,00	7.392.135.592,00	212.124.408,00
	5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	8.548.579.000,00	8.212.000.058,00	336.578.942,00
	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	445.800.000,00	417.400.000,00	28.400.000,00
	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	109.200.000,00	109.200.000,00	-
	5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	6.000.000,00	6.000.000,00	-
	5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	960.800.000,00	960.800.000,00	-
	5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	53.400.000,00	53.400.000,00	-
	5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.903.650.000,00	3.804.450.000,00	99.200.000,00
	5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	160.000.000,00	160.000.000,00	-
	5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
	5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi, Telepon, Air dan Listrik	10.500.000,00	10.500.000,00	-
	5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	94.450.000,00	93.085.000,00	1.365.000,00
	5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan /Reklame, Film dan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
	5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	1.260.000,00	836.568,00	423.432,00
	5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2.501.000,00	1.838.600,00	662.400,00
	5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	130.500.000,00	43.811.640,00	86.688.360,00
	5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat	286.480.000,00	281.940.000,00	4.540.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faximil/Internet/TV berlangganan	2.235.738.000	2.143.400.000	92.338.000,00
	5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket Pengiriman	7.800.000	5.600.000	2.200.000,00
	5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	34.000.000,00	33.238.250,00	761.750,00
	5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52.539.800,00	45.414.800,00	7.125.000,00
	5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	52.539.800,00	45.414.800,00	7.125.000,00
	5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	-
	5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	202.940.000,00	149.190.000,00	53.750.000,00
	5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-
	5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	151.000.000,00	112.250.000,00	38.750.000,00
	5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	39.940.000,00	24.940.000,00	15.000.000,00
	5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	64.000.000,00	18.901.000,00	45.099.000,00
	5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	33.000.000,00	9.000.000,00	24.000.000,00
	5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	31.000.000,00	9.901.000,00	21.099.000,00
	5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.000.000,00	14.000.000,00	-
	5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	14.000.000,00	14.000.000,00	-
	5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	274.005.300,00	164.559.100,00	109.446.200,00
	5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182.005.300,00	149.559.100,00	32.446.200,00
	5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat	165.425.300,00	139.129.100,00	26.296.200,00
	5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	16.580.000,00	10.430.000,00	6.150.000,00
	5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92.000.000,00	15.000.000,00	77.000.000,00
	5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	92.000.000,00	15.000.000,00	77.000.000,00
	5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	6.573.061.599,99	6.154.598.313,00	418.463.286,99
	5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.573.061.599,99	6.154.598.313,00	418.463.286,99
	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	298.876.500,00	227.368.500,00	71.508.000,00
	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.194.479.099,99	5.847.523.813,00	346.955.286,99
	5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Paket Meeting Dalam Kota	79.706.000,00	79.706.000,00	-
	5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	137.150.000,00	115.200.000,00	21.950.000,00
	5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	137.150.000,00	115.200.000,00	21.950.000,00
	5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	137.150.000,00	115.200.000,00	21.950.000,00

3.1.2 Belanja Modal - LRA

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.838.352.000,00 atau mencapai 97,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.884.839.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	%	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA MODAL					
1	Belanja Peralatan dan Mesin	740.000.000,00	711.060.000,00	96,09	70.500.000,00	908,60
2	Belanja Gedung dan Bangunan	1.144.839.000,00	1.127.292.000,00		-	-
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.884.839.000,00	1.838.352.000,00	97,53	70.500.000,00	2.507,59

Dari total realisasi belanja modal Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupten Ciamis per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.838.352.000,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.2.1 Belanja Modal Peralatan Mesin- LRA

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp.711.060.000,00 dari target Anggaran sebesar Rp.740.000.000,00. Untuk belanja modal per 31 Desember 2023 mencapai 96,09 %. rincian belanja sebagai berikut:

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	740.000.000,00	711.060.000,00	28.940.000,00
1	5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotot Penumpang	450.000.000,00	430.290.000,00	19.710.000,00
2	5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal mebel	14.000.000,00	13.875.000,00	125.000,00
	5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal alat pendingin	6.000.000,00	5.994.000,00	6.000,00
3	5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	270.000.000,00	260.901.000,00	9.099.000,00
		JUMLAH	740.000.000,00	711.060.000,00	28.940.000

3.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.127.292.000,00 dari target Anggaran sebesar Rp.1.144.839.000,00. Untuk belanja modal per 31 Desember 2023 mencapai 98,47 %. rincian belanja sebagai berikut:

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	5.2.3.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.144.839.000,00	1.127.292.000,00	17.547.000,00
	5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan gedung Tempat Kerja	1.144.839.000,00	1.127.292.000,00	17.547.000,00
1	5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan gedung Kantor	1.144.839.000,00	1.127.292.000,00	17.547.000,00
		JUMLAH	1.144.839.000,00	1.127.292.000,00	17.547.000,00

3.2. POS-POS NERACA

3.2.1. ASET	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1 ASET LANCAR	1.473.000,00	7.369.200,00

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.473.000,00 sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.369.200. Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.473.000,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0,00 atau Nihil dan Persediaan barang pakai habis Rp.1.473.000,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.1. KAS DI BP	-	-

Nilai Saldo di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00 atau Nihil sama dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,00 atau Nihil. Saldo di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 atau Nihil terdapat pada Rekening Giro Bendahara Pengeluaran pada Bank Jabar Banten Cabang Ciamis sesuai Berita Acara Penutupan kas pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022	KET
1	2	3	4	5
	Saldo Awal	-	-	
1	- Kas Masuk BP	25.898.319.126	22.134.353.391,00	
2	- Kas Keluar BP/Contra Pos	(159.611.128,00)	(92.344.972,00)	
	- Kas Keluar BP	25.738.707.998,00	22.042.008.419,00	
	Saldo Akhir Kas/Total Arus Kas	-	-	

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.2. PERSEDIAAN	1.473.000,00	7.369.200,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.473.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.369.200,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.473.000,00 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2023, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persediaan Habis Pakai	7.369.200,00	766.550.000,00	772.446.200,00	1.473.000,00
2.	Persediaan Tak Habis Pakai	-	-	-	-
3.	Persediaan Untuk Diserahkan/Dijual	-	-	-	-
	Jumlah Persediaan	7.369.200,00	766.550.000,00	772.446.200,00	1.473.000,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.2.a.	Persediaan Habis Pakai	1.473.000,00	7.369.200,00

Saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.473.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.369.200,00. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Pemegang Barang/Pengelola Barang pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock opname yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor dan sebagainya, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amplop Dinas	-	64.000,00
2	Map Dinas	-	-
3	Kertas HVS A4 70 gsm	-	130.000,00
4	Map Dinas	-	500.000,00
4	Map Dinas	10.000,00	-
5	Kertas HVS A4 80 gsm	50.000,00	-
6	Kartu Penerus Disposisi	181.000,00	345.000,00
7	Kartu Kendali Masuk	561.000,00	430.100,00
8	Kartu Kendali Keluar	561.000,00	430.100,00
9	Refil Tinta Hitam	-	2.750.000,00
10	Refil Tinta Warna	-	2.420.000,00
11	Materai 10.000	50.000,00	300.000,00
11	Kertas HVS	60.000,00	-
	Jumlah Persediaan	1.473.000,00	7.369.200,00

3.2.1.2. ASET TETAP		
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap sebelum Penyusutan	18.949.069.827,55	18.139.233.619,72
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9.184.427.450,00)	(9.607.128.087,00)
Aset Tetap setelah Penyusutan	9.764.642.377,55	8.532.105.532,72

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.18.949.069.827,55 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.18.139.233.619,72 atau Naik sebesar 4,46%. Mutasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
	Saldo awal Aset Tetap per 31 Desember 2022 (audited)		18.139.233.619,72
1).	Mutasi Penambahan :		
	a. Realisasi Belanja Modal	1.838.352.000,00	
	b. Hibah yang diterima	-	
	c. Koreksi Penambahan :		
	- Perolehan aset tetap dari non belanja modal	
	- Pencatatan aset lama yang belum tercatat (koreksi tambah)	
	d. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap	
	e. Mutasi Barang antar SKPD/Unit	-	
	f. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	-	
2).	Mutasi Pengurangan :		
	a. Belanja modal yang tidak	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	
	c. Koreksi pengurangan hasil		
	- Pengurangan Barang karena rusak berat dan lapuk	1.028.515.792,17	
	- Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/doble catat	
	- Reklas Menjadi Aset Tidak	
	- Pengurangan barang krn barang	-	
	- Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	
	- Pengurangan Extra Comptable	-	
		1.028.515.792,17	
	d. Mutasi Barang antar SKPD/Unit	-	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	-	
			809.836.207,83
	Saldo Akhir Aset Tetap per 31 Desember 2023		18.949.069.827,55

Saldo Akhir per 31 Desember 2023 tersebut di atas terdiri dari :

DAFTAR IHTISAR ASET TETAP TAHUN 2023					
NO.	URAIAN	Saldo Awal per 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (UN -AUDITED)
			Penambahan	Pengurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3.1.01.01	Tanah	640.545.778,00	-	-	640.545.778,00
1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesim	9.156.119.310,72	711.060.000,00	921.499.117,17	8.945.680.193,55
1.3.3.01.01	Gedung dan Bangunan	8.317.681.868,00	1.127.292.000,00	107.016.675,00	9.337.957.193,00
1.5.4.01.01	Jalan Irigasi dan Jaringan	24.886.663,00	-	-	24.886.663,00
1.5.4.03.01	Aset lain - lain	-	-	-	-
	Jumlah	18.139.233.619,72	1.838.352.000,00	1.028.515.792,17	18.949.069.827,55

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.3	Tanah	640.545.778,00	640.545.778,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.640.545.778,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.640.545.778,00 tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	640.545.778,00
2.	Mutasi Penambahan :	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Limpahan dari SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah	-
	Reklas antar pos aset tetap	-
	Koreksi tambah hasil Inventarisasi	-
	Hibah dari Kelompok Masyarakat	-
3.	Mutasi Pengurangan	-
	Limpahan ke SKPD	-
	Koreksi kurang karena double catat	-
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	640.545.778,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.4..	Peralatan dan Mesin	8.945.680.193,55	9.156.119.310,72

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.945.680.193,55 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.156.119.310,72. Aset tetap peralatan dan mesin mengalami penambahan belanja Modal sebesar Rp.711.060.000,00 yaitu (1). 1 unit Kendaraan Bermotor Roda 4 @ Rp.430.290.000,00 = Rp.430.290.000,00 (2). 27 unit PC @.Rp.9.663.000,00 = Rp. 260.901.000,00 (3). 1 unit AC @.Rp.5.994.000,00 = Rp.5.994.000,00 (4). Meja Kerja 2 Unit @Rp.2..497.500.00 = sRp.4.995.000,00 (5). 1 Unit Meja Rapat @Rp.2.985.900= Rp.2.985.900,00 (6.) 2 unit Kursi Kerja @.Rp.999.000,00 = Rp.1.998.000,00 (7). 13 unit Kursi Rapat (Lipat) @ Rp.299.700,00 = Rp.3.896.100,00 dan juga mengalami pengurangan Sebesar Rp. 921.499.117,17 karena rusak berat.

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	9.156.119.310,72
2.	Mutasi Penambahan :	711.060.000,00
	Realisasi Belanja Modal :	-
	- Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 1 Unit Rp.430.290.000,00	430.290.000,00
	- PC 27 Unit @ Rp.9.663.000,00	260.901.000,00
	- AC 1 unit @Rp.5.994.000,00	5.994.000,00
	- Meja Kerja 2 unit @Rp.2.497.500,00	4.995.000,00
	- Meja Rapat. 1 unit @Rp.2.985.900,00	2.985.900,00
	- Kursi Kerja 2 unit @Rp.999.000,00	1.998.000,00
	- Kursi Rapat (Lipat) 13 unit @Rp.299.700,00	3.896.100,00
3.	Mutasi Pengurangan	921.499.117,17
	Limpahan ke SKPD	-
	Peralatan dan mesin yang rusak berat:	126.077.768,00
	- 5 unit Kendaraan Roda 2 @Rp.13.577.808,00	67.889.040,00
	- 2 unit Kendaraan Roda 2 @Rp.15.705.808,00	31.411.616,00
	- 1 unit Kendaraan Roda 2 @Rp.14.830.962,00	14.830.962,00
	- 1 unit Kendaraan Roda 2 @Rp.11.946.150,00	11.946.150,00
	- Aset Tetap yang sudah lapuk	669.343.581,17
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	8.945.680.193,55

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.2..	Gedung dan Bangunan	9.337.957.193,00	8.317.681.868,00

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.9.337.957.193,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.8.317.681.868,00. Gedung dan Bangunan mengalami penambahan dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	8.317.681.868,00
2.	Mutasi Penambahan	1.127.292.000,00
	Realisasi Belanja Modal	1.127.292.000,00
		-
3.	Mutasi Pengurangan	107.016.675,00
	Penghapusan Gedung UPTD Cimaragas	107.016.675,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	9.337.957.193,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.886.663,00	24.886.663,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 24.886.663,00. sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.24.886.663,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	24.886.663,00
2.	Mutasi Penambahan	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan	-
	Limpahan aset tetap dari SKPD	-
3.	Mutasi Pengurangan	-
	Penghapusan	-
	Koreksi kurang karena tidak masuk batas Kapitalisasi	-
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	24.886.663,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.184.427.450,00	9.607.128.087,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.9.184.427.450,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.607.128.087,00 mengalami penurunan sebesar Rp.422.700.637,00. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap menetapkan bahwa penyusutan aset tetap dihitung per-bulan dan disajikan per tahun. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap, termasuk juga atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis telah melaksanakan penggabungan atas seluruh pengadaan yang sifatnya rehabilitasi atau peningkatan dan meningkatkan masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut termasuk juga penggabungan penghitungan dan penyajian penyusutan aset tetapnya, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022	Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Saldo Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanah	640.545.778,00	-	-	-	-	640.545.778,00
2	Peralatan dan Mesin	9.156.119.310,72	8.318.052.318,00	-	562.021.856,00	7.756.030.462,00	1.400.088.848,72
3	Gedung dan Bangunan	8.317.681.868,00	1.284.661.881,00	137.207.553,00	-	1.421.869.434,00	6.895.812.434,00
4	Jalan irigas dan Jaringan	24.886.663,00	4.413.888,00	2.113.666,00	-	6.527.554,00	18.359.109,00
5	Aset lain-lain		-	-	-	-	-
	Jumlah	18.139.233.619,72	9.607.128.087,00	139.321.219,00	562.021.856,00	9.184.427.450,00	8.954.806.169,72

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.4.1	Aset Lain-lain/Rusak Berat	1.052.009.692,17	302.811.063,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.052.009.692,17)	(302.811.063,00)
	Aset lain-lain neto	0,00	0,00

Saldo Akumulasi penyusutan aset lain lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.052.009.692,17, aset lain-lain tersebut merupakan aset yang sudah rusak berat sedangkan saldo per per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.302.811.063,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.5. KEWAJIBAN	370.000.486,00	186.452.550,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.370.000.486,00 sedangkan saldo per per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.212.154.076,00. Kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp.370.000.486,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.5.1. Kewajiban Jangka Pendek	186.452.550,00	212.154.076,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.370.000.486,00 sedangkan saldo per per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.186.452.550,00. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp.370.000.486,00 merupakan bagian utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari utang Jasa kantor dan utang belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.5.1.1 Utang Belanja Pegawai	367.812.562,00	184.744.752,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.367.812.562,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.184.744.752,00 merupakan utang belanja pegawai bulan Desember 2023 sebesar Rp.367.812.562,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	184.744.752,00	-
	- Pembayaran Utang belanja pegawai	(184.744.752,00)	-
	- Pembayaran Utang belanja pegawai	367.812.562,00	-
2	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	367.812.562,00	-

		30 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.5.1.2	Utang Belanja Jasa Kantor	2.187.924,00	1.707.798,00

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.187.924,00. sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.707.798,00. merupakan utang belanja yang bersifat kegiatan operasional, belanja jasa kantor untuk pembayaran telepon Rp.69.714,00, air Rp.182.600,00, listrik Rp.1.935.610,00 pemakaian pada bulan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	1.707.798,00	-
	- Pembayaran Utang belanja Jasa Kantor	(1.707.798,00)	-
	- Pembayaran Utang belanja Jasa Kantor	2.187.924,00	-
2	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	2.187.924,00	-

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.6.	EKUITAS	8.352.846.258,72	8.809.678.186,72

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.8.352.846.258,72 sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.8.809.678.186,72. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.352.846.258,72 merupakan hasil perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 dari Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 31 Desember 2022 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2022	8.352.846.258,72	Merupakan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022
2.	Surplus/Defisit Operasional	(24.699.502.215,17)	
3.	RK PPKD	25.738.707.998,00	
4.	RK PPKD barang	4.062.850,00	
5.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	
	Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023	9.396.114.891,55	

3.3. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

3.3.1. Pendapatan – LO

Realisasi Pendapatan - LO SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupten Ciamis per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 (Nihil) dikarenakan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak mendapatkan hibah dan juga bukan SKPD Penghasil.

3.3.2. Beban - LO

Realisasi Beban-LO sebesar (Rp.24.699.502.215,17) terdiri dari realisasi Beban Operasional-LO. Sedangkan realisasi Belanja-LRA diluar belanja modal adalah sebesar Rp.23.900.355.998,00 terdiri dari realisasi Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp.5.344.152.577,00 dan realisasi belanja barang dan jasa-LO Rp.18.562.579.747,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp.23.900.355.988,00 dengan realisasi Belanja Operasional-LO sebesar Rp.24.699.502.215,17 terdapat selisih lebih besar belanja Operasional-LO sebesar Rp.799.146.227 disebabkan adanya pengakuan tambahan beban utang belanja jasa kantor dan beban belanja pegawai bulan Desember 2023 yang dibayar di tahun berikutnya dan juga adanya beban persediaan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupten Ciamis yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupten Ciamis dalam tahun 2023, adanya pengakuan beban persediaan yang belum di gunakan serta bertambahnya beban penyusutan dari aset tetap. dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN	JUMLAH BEBAN-LO 31 DESEMBER TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.	BEBAN -LO						
9.1.	BEBAN OPERASIONAL-LO	24.089.624.210,00	376.889.560,00	(188.581.600,00)	24.277.932.170,00	21.951.937.293,00	110,60
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	5.527.044.463,00	367.812.562,00	(184.920.676,00)	5.709.936.349,00	5.869.056.374,00	97,29
9.1.2.	BEBAN BARANG DAN JASA - LO -	18.562.579.747,00	9.076.998,00	(3.660.924,00)	18.567.995.821,00	16.082.880.919,00	115,45
	BEBAN PERSEDIAAN - LO :	3.688.236.350,00	7.369.200,00	(1.473.000,00)	3.694.132.550,00	4.510.849.524,00	81,89
	BEBAN JASA - LO :	8.439.505.858,00	1.707.798,00	(2.187.924,00)	8.439.025.732,00	7.391.648.142,00	114,17
	BEBAN PEMELIHARAAN - LO :	280.239.226,00	-	-	280.239.226,00	369.779.703,00	75,79
	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO :	6.154.598.313,00	-	-	6.154.598.313,00	3.810.603.550,00	161,51
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.10.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.11.	BEBAN LAIN-LAIN - LO	-	-	-	-	-	-
9.2.	BEBAN TRANSFER - LO	-	-	-	-	-	-
9.2.1.	BEBAN TRANSFER BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA - LO	-	-	-	-	-	-
9.2.2.	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - LO	-	-	-	-	-	-
9.3.	BEBAN PENYUSUTAN - LO	-	365.904.325,00	-	365.904.325,00	351.750.063,00	
9.3.1.	BEBAN PENYUSUTAN - LO	-	365.904.325,00	-	365.904.325,00	351.750.063,00	
9.4.	DEFISIT NON OPERASIONAL -	-	-	-	-	-	-
9.4.1.	DEFISIT PENGHENTIAN ASET - LO	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN - LO	24.089.624.210,00	742.793.885,00	(188.581.600,00)	24.643.836.495,00	22.303.687.356,00	110,49

3.3.2.1. Beban Operasional- LO

Beban Operasional - LO terdiri dari:

3.3.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.527.044.463,00 atau lebih kecil jika di bandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.344.152.577,00 yang disebabkan terdapatnya pembayaran Tambahan Penghasilan PNS bulan November 2023 dan Desember 2023 yang belum dibayarkan dan adanya pembayaran tahun lalu selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PEGAWAI TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PEGAWAI TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO 31 DESEMBER TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.01.	BEBAN PEGAWAI	5.344.172.577	367.812.562,00	(184.920.676)	5.896.905.815	5.869.056.374	100,47
9.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.360.507.000	-	-	2.360.507.000	2.638.975.000	89,45
9.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	11.886.000	-	-	11.886.000	-	-
9.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	238.750.828	-	-	238.750.828	263.315.288	90,67
9.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.127.270	-	-	1.127.270	-	-
9.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	303.740.000	-	-	303.740.000	332.080.000	91,47
9.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK	2.144.000	-	-	2.144.000	-	-
9.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.485.000	-	-	13.485.000	16.025.000	84,15
9.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	115.292.640	-	-	115.292.640	128.967.690	89,40
9.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	796.620	-	-	796.620	-	-
9.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.934.299	-	-	7.934.299	7.529.866	105,37
9.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	26.059	-	-	26.059	33.166	78,57
9.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PPPK	265	-	-	265	-	-
9.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	168.492.703	12.661.712,00	(6.377.176)	187.531.591	185.427.950	101,13
9.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	605.490	-	-	605.490	-	-
9.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.844.794	-	-	4.844.794	5.405.110	-
9.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	28.480	-	-	28.480	-	-
9.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	14.534.417	-	-	14.534.417	23.393.124	-
9.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	85.436	-	-	85.436	-	-
9.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	491.912.000,00	89.906.000,00	(9.935.000)	591.753.000	123.741.501,00	478,22
9.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	63.364.000,00	10.672.000,00	(4.668.000)	78.704.000	87.565.746,00	89,88
9.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.544.615.276,00	254.572.850,00	(163.940.500,00)	1.963.128.626	2.056.596.933,00	95,46
	JUMLAH BEBAN - LO	5.344.172.577,00	367.812.562,00	(184.920.676,00)	5.896.905.815	5.869.056.374	100,47

3.3.2.1.2 Beban Persediaan - LO

Realisasi Beban Pakai Habis-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.688.236.350,00 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Persediaan-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.682.340.150,00 yang disebabkan adanya pengurangan akibat masih terdapatnya persediaan pada akhir tahun yang belum digunakan dan adanya penambahan saldo persediaan tahun lalu selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	PENAMBAHAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO 31 DESEMBER TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1	BEBAN BARANG DAN JASA-LO						
8.1.2.	Beban Persediaan	3.682.340.150,00	1.473.000,00	(7.369.200,00)	3.691.182.350,00	4.510.849.524,00	81,83
8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.828.000,00			32.828.000,00	48.000.000,00	68,39
8.1.02.01.01.0010.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.620.000,00	-	-	2.620.000,00	2.040.000,00	128,43
8.1.02.01.01.0015.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	440.243.000,00	-	-	440.243.000,00	681.580.000,00	64,59
8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	766.550.000,00	1.473.000,00	(7.369.200,00)	775.392.200,00	768.738.774,00	100,87
8.1.02.01.01.0025.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-			-	29.592.850,00	-
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	311.451.350,00			311.451.350,00	161.920.000,00	192,35
8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.860.000,00			2.860.000,00	3.800.000,00	75,26
8.1.02.01.01.0028.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	-			-	33.580.400,00	-
8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-			-	19.844.000,00	-
8.1.02.01.01.0030.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.815.000,00			13.815.000,00	37.413.500,00	36,93
8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.696.000,00			5.696.000,00	18.055.000,00	31,55
8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	-			-	37.200.000,00	-
8.1.02.01.01.0039.	Beban Barabg Untuk di Jual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.881.800,00			20.881.800,00	0,00	-
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.001.015.000,00			2.001.015.000,00	2.662.737.500,00	75,15
8.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	84.380.000,00			84.380.000,00	6.347.500,00	1.329,34
	JUMLAH	3.682.340.150,00	1.473.000,00	(7.369.200,00)	3.691.182.350,00	4.510.849.524,00	81,83

3.3.2.1.3 Beban Jasa Kantor - LO

Realisasi Beban Jasa Kantor - LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.439.985.984,00 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa Kantor-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.439.505.858,00 yang disebabkan terdapatnya pembayaran Jasa Kantor pemakaian bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan dan adanya pembayaran tahun lalu selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	PENAMBAHAN BEBAN JASA TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN JASATAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO 31 DESEMBER TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.2	BEBAN JASA	8.439.985.984,00	2.187.924,00	(1.707.194,00)	8.443.881.102,00	7.391.649.142,00	114,24
8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	417.400.000,00	-	-	417.400.000,00	105.800.000,00	-
8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	109.200.000,00	-	-	109.200.000,00	65.000.000,00	168,90
8.1.02.02.01.0005.	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-
8.1.02.02.01.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	960.800.000,00	-	-	960.800.000,00	663.486.000,00	144,81
8.1.02.02.01.0020.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	53.400.000,00	-	-	53.400.000,00	55.500.000,00	96,22
8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	30.000.000,00	-
8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.804.450.000,00	-	-	3.804.450.000,00	2.318.600.000,00	164,08
8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
8.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.125.000,00	133,33
8.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00	138.500.000,00	101,08
8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	492.125.000,00	15,24
8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	-	-	0,00	2.400.000,00	-
8.1.02.02.01.0041.	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	10.500.000,00	-	-	10.500.000,00	0,00	-
8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	93.085.000,00	-	-	93.085.000,00	20.000.000,00	-
8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	0,00	-
8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon	836.568,00	69.714,00	(69.140,00)	975.422,00	835.420,00	116,76
8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air	1.904.200,00	182.600,00	(117.000,00)	2.203.800,00	1.551.600,00	142,03
8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik	44.226.166,00	1.935.610,00	(1.521.054,00)	47.682.830,00	37.805.259,00	126,13
8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	281.940.000,00	-	-	281.940.000,00	357.100.000,00	78,95
8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.143.400.000,00	-	-	2.143.400.000,00	2.858.366.463,00	-
8.1.02.02.01.0064.	Beban Jasa Paket Pengiriman	5.600.000,00	-	-	5.600.000,00	0,00	-
8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33.238.250,00	-	-	33.238.250,00	32.609.400,00	101,93
8.1.02.02.04.117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	45.414.800,00	-	-	45.414.800,00	9.700.000,00	468,19
8.1.02.02.04.137.	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	-	-	0,00	1.650.000,00	-
8.1.02.02.05.0001.	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	0,00	-
8.1.02.02.05.0009.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	112.250.000,00	-	-	112.250.000,00	104.750.000,00	107,16
8.1.02.02.05.0043.	Beban Sewa Hotel	24.940.000,00	-	-	24.940.000,00	38.985.000,00	-
8.1.02.02.08.0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	10.000.000,00	90,00
8.1.02.02.08.0018.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	9.901.000,00	-	-	9.901.000,00	0,00	-
8.1.02.02.08.0019.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	-	-	0,00	24.760.000,00	-
8.1.02.02.12.0002.	Beban Sosialisasi	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00	15.000.000,00	-
	JUMLAH	8.439.985.984,00	2.187.924,00	(1.707.194,00)	8.443.881.102,00	7.391.649.142,00	114,24

3.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan - LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp.164.559.100,00 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp.164.559.100,00 dikarenakan tidak adanya pengakuan penambahan dan pengurangan untuk beban Pemeliharaan tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	PENAMBAHAN BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO 31 DESEMBER TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.2.03.	Beban Pemeliharaan	164.559.100,00	-	-	164.559.100,00	305.529.703,00	53,86
8.1.02.03.02.0035.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	139.129.100,00	-	-	139.129.100,00	52.699.100,00	264,01
8.1.02.03.02.0117.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.430.000,00	-	-	10.430.000,00	9.150.000,00	-
8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendinein	-	-	-	-	-	-
8.1.02.03.02.0406.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-	-	-	10.670.000,00	-
8.1.02.03.02.0408.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	-	-	-	-	-	-
8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer	-	-	-	-	-	-
8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	164.120.603,00	9,14
8.1.02.03.03.0030.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	-	68.890.000,00	-
	JUMLAH BEBAN	164.559.100,00	-	-	164.559.100,00	305.529.703,00	53,86

3.3.2.1.5 Beban Perjalanan dinas – LO

Realisasi Beban Perjalanan dinas-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.810.603.550,00 sama dengan Realisasi Belanja Perjalanan dinas-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.810.603.550,00 dikarenakan tidak adanya pengakuan penambahan dan pengurangan untuk beban Perjalanan dinas tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	PENAMBAHAN BEBAN PERJALANAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PERJALANAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO 31 DESEMBER 3TAHUN 2022	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9..1.4.	Bwban Perjalanan	6.154.598.313,00	-	-	6.154.598.313,00	3.810.603.550,00	161,51
9.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	227.368.500,00	-	-	227.368.500,00	208.667.250,00	108,96
9.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.847.523.813,00	-	-	5.847.523.813,00	3.601.936.300,00	162,34
9.1.02.04.01.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	79.706.000,00	-	-	79.706.000,00	0,00	-
	JUMLAH	6.154.598.313,00	-	-	6.154.598.313,00	3.810.603.550,00	161,51

3.3.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.605.981.905,17. beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas nilai satu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut

REK.	URAIAN	LRA PENYUSUTAN TAHUN 2022	PENAMBAHAN BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH PENYUSUTAN DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	-	605.981.905,17	546.726.130,00	59.255.775,17
9.1.9.01.	BEBAN PENYUSUTAN	-	605.981.905,17	546.726.130,00	59.255.775,17
9.1.02.04.01.0001.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	351.750.063,00	365.904.325,00	(14.154.262,00)
9.1.02.04.01.0002.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	169.217.017,00	166.353.637,00	2.863.380,00
9.1.02.04.01.0003.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	2.113.666,00	2.113.667,00	(1,00)
9.1.02.04.01.0004.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
9.1.02.04.01.0005.	Beban Penyusutan Aset lain-lain	-	82.901.159,17	12.354.501,00	70.546.658,17
	JUMLAH	-	605.981.905,17	546.726.130,00	59.255.775,17

3.3.2.1.7 Beban Defisit- LO

Realisasi beban Defisit-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(24.699.502.215,17) sedangkan beban Defisit-LO per 31 Desember 2022 Rp.(22.498.664.423,00), ada kenaikan beban sebesar Rp.(2.200.837.792,17) atau 8,91% .

3.4 POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2023 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp.9.396.114.891,55. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp.9.396.114.891,55 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp.8.352.846.258,72 ditambah surplus/Defisit-LO sebesar (Rp.24.699.502.215,17), RK. PPKD sebesar Rp.25.738.707.998,00 dan RK PPK Barang sebesar Rp.4.062.850,00, sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp.9.396.114.891,55 dengan rincian sebagai berikut :

REK	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	EKUITAS AWAL	8.352.846.258,72	8.809.678.186,72	
	Surplus Defisit-LO	(24.699.502.215,17)	(22.498.840.347,00)	
	RK PPKD	25.738.707.998,00	22.042.008.419,00	
	RK PPKD Barang	4.062.850,00		
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar			
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	9.396.114.891,55	8.352.846.258,72	

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

3.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.8.352.846.258,72. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas Neraca per 31 Desember 2023 (*audited*) yang terdiri atas :

Ekuitas Awal	9.396.114.891,55
- Ekuitas	8.352.846.258,72
- Surplus/Defisit LO	(24.699.502.215,17)
- RK PPKD	25.738.707.998,00
- RK Barang	4.062.850,00
- Koreksi Kesalahan Ekuitas	

3.4.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.(24.699.502.215,17) Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional Beban-LO sebesar Rp.24.699.502.215,17 dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023.

3.4.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas misalnya dampak kumulatif perubahan kebijakan dengan diterapkannya penyusutan aset tetap tahun lalu dan penyisihan piutang tahun lalu, koreksi kesalahan mendasar seperti reklasifikasi aset tetap ke barang ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi, koreksi atas utang yang telah dilunasi pada tahun lalu, koreksi reklasifikasi pengakuan aset tetap menjadi barang jasa, dan sebagainya. Adapun rincian dampak kumulatif tersebut per 31 Januari 2023 sampai per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

REK	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KOREKSI KESALAHAN EKUITAS	-	-	
	Koreksi Kesalahan - Ekuitas	-	-	
	Koreksi Kesalahan	-	-	

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Tahun Anagaran 2023 Mendapat Alokasi Anggaran DAK Non Fisik, DAK Fisik, DAK PPPA Non Fisik dan Banprop dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Dana Dak Fisik Sebesar Rp. 1.914.839.000
2. Sumber Dana Dak Non Fisik Sebesar Rp. 12.710.865.000
3. Sumber Dana Dak Non Fisik PPPA Rp. 438.800.000
4. Sumber Dana Banprop Rp. 357.500.000



BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

4.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 2. Kepala Seksi Perlindungan Anak.
 3. Kepala Seksi Pengarusutama Gender
- d. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
 1. Kepala Seksi Keluarga Berencana;
 2. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan:
 1. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk
 2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 Data Sumber Daya Manusia/Pegawai

- a. Data Sumber Daya Manusia/Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Dian Budiyan, M.Si	Pembina Tk. I IVb	Kepala Dinas	S3
2	Sujono, S.Sn, MM	Pembina Tk I, IV/b	Sekretaris	S2
3	Dede Hermawan, S.IP	Penata Muda Tk I III/b	KA. Sub Bagian Umum & Kepegawaian	S1
4	Agoes Djadjang Gandjar	Penata Muda, III/a	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	SMA
5	Usep Saepul Ulum S.IP	Penata Muda, III/a - 9	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pratama	S1
6	Yeni Heryani, S.Sos	Penata Tk I, III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah /Kasubag Keuangan	S1 STKS
7	Tohari	Penata Muda Tk I, III/b	Pengadministrasian keuangan	SMEA
8	Elis Lismayani, S.KM, S.ST	Penata Tk I, III/d	Kasubag Perencanaan	S1

9	Noni Dia Mardiana, ST	Penata Tk I, III/d	Analisis Perencanaan Program Sekretariat	S1 Teknik
10	Irma Nur Anisa S.AP	Penata Muda, III/a - 9	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pratama	S1
11	Drs. Ahmad Ruhmani, M.Si	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Sarjana S1 Agama Bahasa Arab
12	Dra. Hj. Erni Mulyaningsih, M.Si	Pembina, IV/a	Kepala seksi pemberdayaan Perempuan	S2 UNIGAL
13	Drs. M. Syaiful Bahri, M.Si	Pembina, IV/a	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	S2 UNIGAL
14	Subhan Fauzi, SE	Penata Muda, III/a - 9	Ahli Pratama Penggerak Swadaya Masyarakat	S1
15	Reni Sri Nurul Ilmi, S.Pd	PenataMuda , III/a - 9	Ahli Pratama Penggerak Swadaya Masyarakat	S1 UNIGAL
16	Ir. Djafar Siddiq, M.Si	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk penyuluhan dan Penggerakan	S2 UNIGAL
17	Drs. Yoyo, M.Si	Pembina,IV/a	Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan	S2 STIA YPPT TSM
18	Linawati	Penata Muda Tk I, III/b	BPP Bid. Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	SMEA
19	Nonoy, S.Ag, Msi	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	S2 UNIGAL
20	Hj. Dede Iyet Rohaety, SE, M.Si	Pembina, IV/a	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	S2 UNIGAL
21	Awaludin Wahyu Alamsyah, s. Kep.Ners, MM	Penata Tk. I, III/d	Kepala Seksi Keluarga Berencana	S2 Manajemen
22	Susanto	Penata Muda Tk I, III/b	Pengadministrasi umum	SMA
23	Een Hasilah Pamrih, S.PSi	Penata Tk I, III/d	Ka. UPTD DPP KBPPPA wilayah Kecamatan Ciamis	Sarjana Psikologi
24	R. Sunarya, S.IP	Penata Muda Tk I, III/b	Kasubag UPTD Kec. Ciamis	S1
25	Dra. Eni Kurnaeni	Penata Tk. I, III/d	Ka. UPTD DPP KBPPPA wilayah Kecamatan Cijeungjing dan Cimaragas	S1 STKS
26	Komariah, S.AP	Penata Muda Tk. I, III/b	Ka. UPTD DPPKBPPPA wilayah Kecamatan Cisaga dan Sukadana	S1
27	E Sri Herawati, S. Ap	Penata Tk I, III/d	Ka. UPTD DPP KBPPPA Kec. Wilayah Cipaku	S1
28	Iin Solihin, S.Ag	Penata Muda Tk I, III/b	Ka.TU UPTD DPPKBPPPA Kec. Wilayah Cipaku	S1
29	Dian Sri Suhardiani, SE	Penata Tk I, III/d	Ka.TU UPTD DPPKBPPPA Kec. Kawali dan Lumbung	SMA
30	Teti Susilawati, S.ST	Penata , III/c	Ka. UPTD DPP KBPPPA Kecamatan Rajadesa dan Jatinagara	S1

31	Ijah Cahyati	Penata Tk I, III/d	Kasubag TU UPTD Kec. Kecamatan Rajadesa dan Jatinagara	SLTA
32	Drs. Roheman, MM	Pembina, IV/a	Ka. UPTD DPP KBPPPA wilayah Kecamatan Cihaurbeuti dan Sindangkasih	S2
33	Elis Ratnaningsih, A.Md	Penata Tk I, III/d	Ka. UPTD DPP KBPPPA Kecamatan Cikoneng dan Sadananya	D3 UT
34	Iwan Setiawan, SH. MH	Pembina, IV/a	Ka. Subbag TU Kec. Cikoneng dan Sadananya	S2
35	Didi Cahyadi, S.KM	Penata Tk. I, III/d	Ka. UPTD DPP KBPPPA wilayah. Kecamatan Rancah	S1 NERS
36	Mashuri Budiman,S.IP	Penata, III/c	Ka. UPTD DPP KBPPPA Kecamatan Panjalu	S1
37	Ketut Sukmono S. Kep.Ners	Penata Tk. I, III/d	Ka. UPTD DPP KBPPPA wilayah Kecamatan Panawangan	S1
38	Widianingsih, SKM	Penata, III/c	Ka. Subbag TU Kecamatan Panawangan	S1
39	Dra. Ika Mutiarsih	Penata Tk I, III/d	Ka. UPTD DPP KBPPPA Kecamatan Lakbok	S1 UNSIL
40	Maryati	Penata Tk. I , III/d	Ka. Subag TU UPTD wilayah Kecamatan Lakbok	SLTA
41	Yayan Diwangkara, S.KM	Penata Tk I, III/d	Ka. UPTD DPP KBPPPA WilayahKecamatan Pamaarican	S1 Kesmas
42	Inding Supriadi, S. IP	Penata Muda Tk I, III/b	Ka. Subag TU UPTD wilayah Kecamatan Panumbangan	Sarjana
43	Yaya Sutarya	Penata, III/c	Ka. UPTD DPP KBPPPA WilayahKecamatan Banjarsari	SLTA
44	Yati Cahyawati, A.Md Kep	Penata Muda, III/a	Ka. Subag TU UPTD wilayah Kecamatan Banjarsari	Diploma III

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sebanyak 44 pegawai dari Jumlah 50 Pegawai, berkurang 6 pegawai pada tahun 2023 dikarenakan pensiun di antaranya adalah :

1. Yeti Puji Hartati pensiun TMT 1 April 2023 dengan jabatan Kepala UPTD Wilayah Panawangan
2. Ade Atin Maesaroh, S.IP TMT 1 Agustus 2023 dengan jabatan Kepala UPTD Wilayah Ciamis
3. Adik Kusnarti TMT 1 Agustus 2023 Ka TU Wilayah Cihaurbeuti
4. Tating Supriati TMT 1 Oktober 2023 dengan Jabatan Kepala UPTD Wilayah Panjalu
5. Endo Haryanto, se TMT 1 Oktober 2023 dengan Jabatan Kepala UPTD Wilayah Panawangan
6. Hamim, S.IP TMT 1 Desember 2023 dengan Jabatan Kepala UPTD Wilayah Panumbangan

- b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Ciamis berdasarkan Esselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala	II a	1
2.	Sekretaris	III b	1
3.	Kepala Bidang	III a	3
4.	Kepala Sub. Bagian	IV a	3
5.	Kepala Seksi	IV a	5
6.	Kepala UPTD P5A	IV a	14
7.	Kepala Sub.Bagian TU UPTD P5A	IV b	8
8.	Pelaksana/fungsional umum	-	5
9.	Fungsional / PPPK	-	4
	Jumlah		44



BAB V
PENUTUP

Laporan Keuangan Akhir tahun merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan selama setahun anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan, sehingga diharapkan mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami pula oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Januari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ciamis



Dr. DIAN BUDIYANA, MSi

Pangkat Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196712131993011001